

ABSTRAK

Sejak pasca reformasi, peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia selalu mengalami dinamika perubahan sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masyarakat. Memasuki tahun 2015, terjadi fenomena pilkada dengan pasangan calon tunggal yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan tidak pernah diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlu dikaji bagaimana dinamika pengaturan pilkada pasca reformasi hingga saat ini dan bagaimana pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal di Indonesia berdasarkan konsep demokrasi dan konstitusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif, karena ditujukan pada peraturan perundang-undangan, sehingga erat kaitannya dengan perpustakaan. Selain itu, ada dua pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dinamika perubahan pengaturan perundang-undangan mengenai pilkada disebabkan karena adanya tuntutan masyarakat untuk melaksanakan pilkada secara demokratis dan dipilih secara langsung oleh masyarakat seperti halnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta diperbolehkannya calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui jalur independen sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara. Selain itu, munculnya fenomena pilkada dengan pasangan calon tunggal sejak tahun 2015 yang lalu, secara konstitusional harus tetap dilaksanakan, karena UUD NRI 1945 telah menjamin hak konstitusional warga negara yang dalam hal ini adalah hak untuk dipilih dan memilih. Akan tetapi, pelaksanaan pilkada dengan pasangan calon tunggal harus diupayakan tidak terjadi lagi sebagai bentuk antisipasi adanya rekayasa politik oleh calon petahana atau calon dari partai penguasa yang justru akan merugikan rakyat.

Kata Kunci: Demokrasi, Konstitusi, Pilkada, Calon Tunggal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan	7
1.4. Kegunaan	8
1.5. Keaslian.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.6.1. Jenis Penelitian.....	10
1.6.2. Pendekatan Penelitian	10
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum	12
BAB II TEORI DAN KONSEP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN PASANGAN CALON TUNGGAL	13
2.1. Pengertian Pilkada Calon Tunggal.....	13
2.2. Teori Konstitusi.....	13
2.3. Teori Demokrasi	17
2.5. Konsep Pilkada Dengan Pasangan Calon Tunggal Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.....	22
BAB III DINAMIKA PENGATURAN PILKADA DAN PELAKSANA- AN PILKADA DENGAN PASANGAN CALON TUNGGAL ID INDONESIA BERDASARKAN KONSEP DEMOKRASI DAN KONSTITUSI.....	26
3.1. Dinamika Pengaturan Pilkada Pasca Reformasi	26
3.2. Pelaksanaan Pilkada Dengan Pasangan Calon Tunggal Di-	

	Indonesia Berdasarkan Konsep Demokrasi dan Konstitusi...	55
BAB IV	PENUTUP	57
	4.1. Kesimpulan	57
	4.2. Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA	59
	BIODATA PENULIS	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Judul skripsi yang hampir sama	8
Tabel 3.1. Perbandingan UU No. 32 Tahun 2004 dengan UU No. 12 Tahun 2008.....	41
Tabel 3.2. Perbandingan UU No. 22 Tahun 2014 dengan UU No. 1 Tahun 2015.....	42
Tabel 3.3. Perbandingan UU No. 8 Tahun 2015 dengan UU No. 10 Tahun 2016.....	43